

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pelebagaan politik lokal Minang di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk lembaga politik lokal Minang dan mengidentifikasi hambatan kekuasaan otoritas yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelebagaan politik lokal di daerah ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat Minangkabau yang tercermin dalam peran sentral lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai pengawal nilai, norma, dan tradisi dalam tata kelola pemerintahan nagari serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Namun, terdapat hambatan utama yaitu adanya konflik kepentingan antara lembaga adat dan lembaga pemerintah formal. Selain itu, modernisasi dan dinamika politik praktis seringkali menimbulkan ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan demokrasi modern, yang menyebabkan ketimpangan dalam pengambilan keputusan.

Kata Kunci: *Pelebagaan Politik Lokal, Lembaga Adat, Otoritas*

ABSTRACT

This research investigates the institutionalization of Minang local politics in West Pasaman Regency, West Sumatra Province. Its primary focus is to analyze the forms of Minang local political institutions and identify the obstacles to their authoritative power. Using a qualitative descriptive approach, the study found that the institutionalization of local politics in this area is heavily influenced by Minangkabau customary values. This is evident in the central role played by traditional institutions such as the Kerapatan Adat Nagari (KAN) and the Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). These bodies function as guardians of values, norms, and traditions in nagari (village) governance, and they act as strategic partners for the government in planning and implementing development. However, a significant challenge emerged: conflicts of interest between customary institutions and formal government bodies. Furthermore, modernization and practical political dynamics frequently create tension between traditional values and the demands of modern democracy, leading to imbalances in decision-making.

Keywords: Local Political Institutionalization, Traditional Institutions, authorit

